

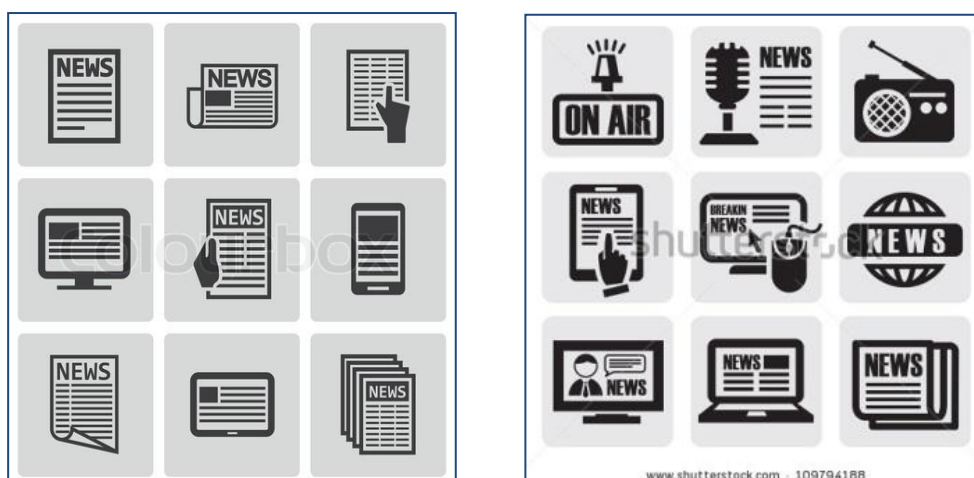


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Kliping Digital Media Online

Ekonomi

Selasa, 24 Mei 2022



BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan & Kearsipan
Jakarta
2022

Daftar Isi

1. PROTEKSI DAYA BELI MASYARAKAT MENJADI PRIORITAS DALAM APBN 2022
- *Media Online Kompas*
2. MANUVER MONETER JAGA BUNGA - *Media Online Bisnis Indonesia*
3. AMBISI SARAT TANTANGAN - *Media Online Bisnis Indonesia*
4. TARGET PENERIMAAN TAK MULUK - *Media Online Bisnis Indonesia*
5. PEMERINTAH FOKUS PULIHKAN EKONOMI - *Media Online Media Indonesia*
6. MEWASPADAI TEKANAN STAGFLASI GLOBAL - *Media Online Media Indonesia*
7. CELAH PEMBIAYAAN SDGs MELEBAR - *Media Online Media Indonesia*

PROTEKSI DAYA BELI MASYARAKAT MENJADI PRIORITAS DALAM APBN 2022

Dinamika global yang belakangan terjadi membuat dua pos belanja anggaran negara, yakni pos belanja subsidi energi dan pos belanja perlindungan sosial, menjadi sangat vital untuk menjaga daya beli masyarakat.

**DIMAS WARADITYA
NUGRAHA**

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah memutuskan untuk kembali mengotak-atik fiskal guna merespons dinamika global yang dapat memicu inflasi, salah satunya akibat terkejutnya harga energi dunia. Pada akhirnya, anggaran belanja negara tahun ini difokuskan sebagai instrumen penjaga daya beli rakyat sehingga risiko global dapat diantisipasi secara optimal.

Upaya meracik ulang anggaran dilakukan untuk mengakomodasi pennebalan anggaran belanja negara untuk subsidi energi dan perlindungan sosial. Kedua pos belanja itu wajib dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memastikan inflasi tetap terkendali.

Dalam konferensi pers APBN Kita yang dilakukan secara virtual, Senin (23/5/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan harga minyak memang menjadi katalis positif bagi penerimaan negara. Akan tetapi, kondisi ini juga membawa konsekuensi besar, yakni makin gemuknya kebutuhan belanja untuk subsidi energi dan perlindungan sosial.

Melalui APBN, pemerintah memberikan perlindungan sosial yang sangat tinggi terutama pada triwulan I-2022. Belanja subsidi energi juga melonjak cukup tinggi, konsekuensi dari kenaikan harga energi dunia," kata Sri Mulyani.

Eskalasi tensi geopolitik, terutama konflik Rusia-Ukraina, telah menyebabkan lonjakan harga komoditas pangan dan energi. Sri Mulyani mencatat, hingga 30 April 2022, harga gas alam dunia melonjak 125,8 persen secara tahunan. Kenaikan harga pada periode yang sama juga dialami oleh ketubara 166 persen, minyak mentah jenis Brent 45,7 persen, dan minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang sebesar 20,9 persen.

Gejolak yang terjadi pada harga energi dunia menyebabkan adanya selisih dalam asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dalam APBN 2022 ditetapkan 63 dolar AS per barel. Padahal, harga ICP pada Maret 2022 sempat menyentuh level 113,5 dolar AS per barel akibat konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut sehingga mengerek harga minyak mentah di pasar internasional.

Selisih tersebut memicu ter-



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan), mewakili pemerintah, memberikan dokumen tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2022 kepada Ketua DPR Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2022).

jadinya kekurangan kebutuhan anggaran untuk subsidi energi dan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero). Sri Mulyani mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui kenaikan anggaran subsidi energi tahun ini sebesar Rp 74,9 triliun. Dengan demikian, alokasi subsidi energi yang sebelumnya ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun naik menjadi Rp 208,9 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sejak awal Januari hingga April 2022 sudah Rp 34,8 triliun, naik hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 23,2 triliun.

"Tingginya pertumbuhan realisasi belanja subsidi di luar perlindungan sosial ini diaki-

batkan kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang menyebabkan naiknya harga komoditas energi (ritel)," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Banggar DPR juga telah menyetujui tambahan anggaran perlindungan sosial pada tahun ini sebesar Rp 18,6 triliun. Dengan adanya tambahan anggaran ini, maka anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2022 menjadi Rp 431,5 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, penambahan anggaran perlindungan sosial merupakan bentuk antisipasi atas risiko inflasi global. Dengan begitu, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai stabilisator sosial dapat dimaksimalkan seoptimal mungkin.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja untuk perlindungan sosial sejak awal Januari hingga April 2022

telah mencapai Rp 129 triliun, meningkat 2,88 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 124 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan belanja perlindungan sosial dipengaruhi oleh percepatan penyaluran bantuan sosial, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), peningkatan realisasi subsidi BBM dan elpiji, serta peningkatan realisasi BLT dana desa.

"Realisasi pada program perlindungan sosial sangat tinggi, terutama pada masa pemulihan ekonomi di empat bulan pertama tahun ini, saat guncangan semakin tinggi," tutur Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, tingkat inflasi pada tahun ini berpotensi menanjak sehingga berisiko menimbulkan distorsi di pasar keuangan. "Untuk itu, kami melihat 2022 dengan kecenderungan inflasi dan kami

harus menjaga APBN secara hati-hati," katanya.

Belum pulih

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo optimistis APBN masih memiliki ruang untuk menambah subsidi. "Selain dengan opsi realokasi anggaran, pemerintah juga memiliki peluang dari potensi tambahan penerimaan negara," ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun terlihat kecil jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah yang berpotensi melemah. Potensi pelemahan daya beli,

lanjutnya, disebabkan oleh fak-

tor pendapatan yang masih belum pulih seperti masa sebelum pandemi sehingga kelompok rentan berisiko mengalami tekanan inflasi lebih berat, terutama yang bersumber dari komoditas pangan.

"Jika mau memastikan daya beli masyarakat terjaga, tambahan anggaran perlindungan sosial yang dibutuhkan berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun. Namun, dengan begitu, terdapat konsekuensi pelebaran defisit fiskal," kata Bhima.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Maniliet menyampaikan, tantangan inflasi pada tahun ini ditentukan oleh tiga faktor, yakni durasi konflik Rusia-Ukraina, prospek pemulihan ekonomi China dan AS yang berekorelasi, baik dengan ekonomi nasional maupun rantai pasok global, serta kebijakan ekonomi domestik.

”
Jika mau memastikan daya beli masyarakat terjaga, tambahan anggaran perlindungan sosial yang dibutuhkan berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun.

MANUEVER MONETER JAGA BUNGA

Inflasi YoY (%)



Kebijakan Suku Bunga Acuan (%)



Tambahan Subsidi Energi 2022



Rata-rata Tertimbang Suku Bunga Simpanan 3 Bulan & Kredit (%)



PKH 287,7

PBI JKN 46,5

Kartu Sembako 45,1

BLT Desa 28,8

Kartu Prakerja 11

Anggaran Perlindungan Sosial APBN 2022 (Rp triliun)

11,18

10,84

10,33

9,09

9,58

Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi

Bantuan Pendidikan 9

Kartu Prakerja 9

BLT Minyak Goreng 7,5

Bantuan PKL Warung & Nelayan 1,7

Perluasan Perlindungan Tahun Berjalan 2022 (Rp triliun)

Tegar Ariel
tegar.ariel@bisnis.com

Bank Indonesia (BI) punya beragam alasan untuk tetap 'melawan arus global' dengan menjaga tingkat suku bunga di level rendah. Salah satunya dilandasi keputusan pemerintah mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara.

Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu.

Dunia usaha pun merespons antusias pekaung BI menjaga suku bunga tetap rendah.

Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.

Apabila terjadi eskalasi suku bunga acuan, maka secara langsung akan berdampak negatif pada progres pe-

mulihan bisnis di Tanah Air. Selain itu, pengetatan moneter ini juga berisiko membatasi sisi permintaan di kalangan konsumen.

"Pemerintah dan otoritas moneter harus membuat kebijakan yang saling mendukung, agar dunia usaha terus dalam tren positif," ujarnya, Senin (23/5).

Ajib mengatakan, pelonggaran moneter merupakan salah satu stimulus yang masih diharapkan oleh pelaku usaha. Hal itu adalah kebijakan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Harapan senada disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Khandani. Dia berharap konsolidasi perbankan dilakukan dengan maksimal agar pelonggaran moneter berimplikasi besar pada dunia usaha.

Dia mengatakan, kunci dari kebijakan suku bunga ada pada intervensi pemerintah di pasar domestik seperti percepatan pencairan subsidi atau pemberian bantuan langsung, sehingga tingkat inflasi tetap terjaga.

Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.

"Di banyak negara *interest rate* segera meningkat terutama *emerging*, kenaikannya cukup cepat untuk men-

jaga inflasi," ujarnya.

PELONGGARAN

Sementara itu, sejumlah ekonom memprediksi bank sentral masih memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini, yang digelar sejak kemarin, Senin (23/5) dan akan diumumkan hasilnya hari ini, Selasa (24/5).

Analisis Makroekonomi Bank Danamon Irman Faiz mengatakan ruang pelonggaran masih terbuka seiring dengan tingkat inflasi yang masih rendah, serta volatilitas nilai tukar rupiah yang terjaga.

Dia menuturkan dari sisi eksternal, harga komoditas ekspor juga masih tinggi, sehingga neraca perdagangan nasional mencatatkan surplus. "Ditambah lagi pemerintah tidak jadi menaikkan harga Pertaite, sehingga BI masih mempertahankan bunga," katanya.

Selain itu, transaksi berjalan yang mencatatkan surplus pada kuartal I/2022 karena ditopang oleh harga komoditas ekspor yang tinggi akan menjadi bantalan bagi rupiah untuk bergerak lebih stabil meski cenderung akan terdepresiasi.

Irman memperkirakan, dengan kondisi perekonomian saat ini, BI paling cepat akan menaikkan suku bunga acuan pada kuartal III/2022, dengan syarat tingkat inflasi inti juga meningkat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardele menilai, kenaikan anggaran subsidi energi akan efektif men-

jaga tingkat inflasi tetap dalam kendali pemerintah yakni di kisaran 2%-4%.

Sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjaga, yang tecermin dari adanya keseimbangan dari sisi permintaan maupun pasokan, BI diperkirakan masih mempertahankan suku bunga acuan sehingga dapat mendukung momentum pemulihan ekonomi.

Kendati diestimasi menjaga suku bunga di level bawah, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah menyiapkan strategi apabila BI melakukan pengetatan kebijakan secara tiba-tiba.

Dia mengatakan jika BI menaikkan suku bunga acuan di kisaran 1,5%-2%, perusahaan tidak akan melakukan penyesuaian terhadap bunga tabungan dan giro atau *current account saving account* (CASA).

"Untuk CASA saya tidak akan naikan, cukup deposito. Itu pun kami lihat, kalau deposito ternyata harus kita naikan tetapi LDR [*loan to deposit ratio*] masih tinggi, mungkin saya bertahan karena nasabah cukup trust," ujarnya. (Maria Elena/El Luh Anggraeni/El Pungestu Profana/Dianita Damara/Indra Gunawan)

Berita terkait di bisnisindonesia.id



Hlm: 1 - Kolom: Cover Depan

| TARGET INVESTASI ALAS KAKI |

AMBISI SARAT TANTANGAN

Bisnis, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendatangkan investasi jumbo di industri kulit dan alas kaki menghadapi tantangan, mulai dari perjanjian perdagangan bebas dengan negara kompetitor hingga kesulitan bahan baku.

Rahmad Fauzan
rahmad.fauzan@bisnis.com

Dalam Perpres No 74/2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN), pemerintah mematok target investasi sektor industri alas kaki senilai Rp21,7 triliun per tahun dalam tahapan capaian periode 2022—2024.

Target itu cukup ambisius jika dibandingkan dengan realisasi investasi di sektor industri itu yang selama ini hanya berkisar Rp1 triliun per tahun. Pertumbuhan empat kali lipat secara tahunan terakhir terjadi pada 2017 dengan investasi Rp7,62 triliun.

Target tersebut berpotensi terganggu oleh Indonesia-Bangladesh

Preferential Trade Agreement (PTA) yang sedang dalam negosiasi. Sebagai dua negara produsen alas kaki terbesar dunia, kesepakatan dagang Indonesia dengan Bangladesh dinilai berpotensi mengganggu industri dalam negeri serta berpotensi memberikan efek domino terhadap arus investasi.

"Karena sama-sama produsen, perundingan malah berpotensi mengganggu industri lokal kita," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie kepada *Bisnis*, Senin (23/5).

Menurutnya, produk alas kaki Bangladesh bisa membanjiri pasar domestik, seperti halnya pakaian jadi. Upah tenaga kerja dan bahan

baku yang murah di Bangladesh membuat negara itu lebih leluasa dalam memproduksi alas kaki untuk diekspor ke negara tujuan, termasuk Indonesia.

Sebagai perbandingan, upah tenaga kerja di Bangladesh US\$93 per bulan, sedangkan di Indonesia US\$161. Untuk jam kerja, Bangladesh menerapkan 48 jam per pekan, sedangkan di Indonesia 40 jam.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam mencari bahan baku yang kompetitif dan variatif.

DUA SYARAT

Firman mengusulkan dua langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku industri untuk merealisasikan target.

Pertama, stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan produk industri alas kaki yang didominasi oleh pasar ekspor.

Perlu diketahui, kapasitas produksi alas kaki di Tanah Air belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Pada 2020, produk alas kaki hanya diproduksi sebanyak 20%—25% dari kapasitas normal sebanyak 1 miliar pasang per tahun.

Tahun lalu, peningkatan kapasitas produksi produk alas kaki hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan 2020.

Kedua, pelaku mesti mengalokasikan dana untuk riset dan pengembangan, baik untuk inovasi produk maupun biaya. Selain itu,

pelaku harus berani berinvestasi lebih untuk meningkatkan kapasitas produksi.

"Bank perlu membantu menurunkan tingkat suku bunga, khususnya untuk kredit investasi seperti pembelian mesin baru dan perluasan pabrik," ujar Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bima Yudhistira. Namun, pemerintah menyebut Indonesia-Bangladesh PTA tidak akan berdampak terhadap industri alas kaki di Tanah Air.

Menurut Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Elis Masitoh, negosiasi sejauh ini tidak mencantumkan rencana ekspor alas kaki Bangladesh ke Indonesia. ■



BELEID NAVIGASI INDUSTRI

Tahapan Pembangunan Industri Kulit dan Alas Kaki

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No 74/2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 yang memberi arah pengembangan industri nasional, termasuk industri alas kaki, sehingga berdaya saing di kancah global.

Kebijakan	2022	2023	2024
Inisiatif Utama	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan teknis produksi industri kulit, alas kaki, kerajinan kayu/rotan, dan peralatan produksi dari industri plastik dan karet hilir.• Meningkatkan kapasitas produksi 250 juta pcs/tahun untuk industri alas kaki.• Menambah investasi Rp21,7 triliun/tahun.• Meningkatkan nilai ekspor menjadi US\$5,3 miliar/tahun.• Meningkatkan jumlah tenaga yang terserap menjadi 1,12 juta orang per tahun.	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan pusat inovasi teknologi dan perlindungan kekayaan intelektual industri kulit dan alas kaki serta pengembangan teknologi untuk produksi bahan dasar plastik dan karet.• Meningkatkan kapasitas produksi sebesar 250 juta pcs/tahun untuk industri alas kaki.• Menambah investasi Rp21,7 triliun/tahun.• Meningkatkan nilai ekspor menjadi US\$5,3 miliar per tahun.• Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi 1,12 juta orang/tahun.	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sistem rantai pasok bahan baku (kayu dan rotan) serta peningkatan kegiatan litbang desain produk furnitur dengan advokasi dan regulasi terkait kekayaan intelektual.• Meningkatkan kapasitas produksi 250 juta pcs/tahun untuk industri alas kaki.• Menambah investasi Rp21,7 triliun/tahun.• Meningkatkan nilai ekspor menjadi US\$5,3 miliar/tahun.• Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi 1,12 juta orang/tahun.

Hlm: 4 - Kolom: Industri

| PENDAPATAN NEGARA 2023 |

TARGET PENERIMAAN TAK MULUK

Bisnis, JAKARTA — Belum optimalnya reformasi perpajakan serta prospek suram harga komoditas mendorong pemerintah lebih rasional dalam menetapkan target penerimaan negara pada 2023.

Teqar Arief
teqar.arief@bisnis.com

Musababnya, katrol utama yang mampu mengerek penerimaan telah dimanfaatkan dengan maksimal pada tahun ini. Di antaranya adalah implementasi UU No. 11/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan *windfall* dari harga komoditas.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengatakan stagnasi target penerimaan pada 2023 mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki cangkul yang kuat untuk menggali penerimaan negara sebagaimana tahun ini.

Adapun cangkul penggali potensi penerimaan yang telah digunakan pada tahun ini antara lain Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perluasan lapisan kena Pajak Penghasilan (PPH), hingga implementasi pajak karbon.

"Tahun ini ada PPS, sedangkan 2023 tidak ada sehingga kenaikan yang ditetapkan juga terlihat stagnan," kata Prianto kepada *Bisnis*, Senin (23/5).

Dia menambahkan, selain minimnya strategi untuk mendukung penerimaan, pemerintah juga dihadapkan pada ketidakpastian mengenai prospek harga komoditas di pasar global.

Sekadar informasi, sejak pengujung tahun lalu meroketnya harga sejumlah komoditas mampu mendorong kinerja penerimaan jauh di atas target.

Menurut Prianto, kondisi tersebut berpotensi tidak akan terulang pada tahun depan mengingat pergerakan harga sejumlah komoditas telah

menunjukkan stabilitas.

"Kenaikan komoditas tambang tidak terjadi berulang dan konsisten. Dengan demikian pemerintah memprediksi harga tinggi komoditas tidak lagi terjadi pada 2023," ujarnya.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023 yang menjadi rumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pada tahun depan disasar Rp2.266,7 triliun—Rp2.398,8 triliun.

Pada tahun ini pemerintah menargetkan setoran negara dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mencapai Rp2.266,2 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan yang ditargetkan pada tahun depan hanya berada di kisaran 0,02%—5,85%.

Stagnasi juga tercermin dalam rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis menghitung, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2022 di kisaran 4,8%—5,5%, maka rasio pendapatan negara terhadap PDB pada tahun ini di angka 12,65%—12,74%.

Sementara itu pada tahun depan, dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%—5,9% dan asumsi penerimaan senilai Rp2.266,7 triliun, maka rasio pen-

dapatan terhadap PDB di kisaran 11,95%—12,01%.

Adapun jika menggunakan asumsi setoran ke negara pada tahun depan mencapai Rp2.398,8 triliun, maka rasio pendapatan negara terhadap PDB di kisaran 12,65%—12,80%.

Dalam kaitan ini, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, stagnasi target fiskal 2023 menunjukkan bahwa pemerintah masih mewaspadaai berbagai risiko ekonomi.

"Pemerintah dalam hal ini berhati-hati dalam menentukan target penerimaan negara," kata dia.

Fajry menambahkan, pada tahun depan misi utama pemerintah adalah mewujudkan konsolidasi fiskal yang mewujudkan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB.

BATAS DEFISIT

Sejalan dengan itu, kebijakan yang disusun adalah menyeimbangkan antara kebutuhan belanja dan penerimaan sehingga batas defisit tidak melampaui target.

Pada tahun depan, anggaran belanja ditetapkan senilai Rp2.795,9 triliun—Rp2.993,4 triliun.

Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan *outlook* APBN 2022 yang telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan



Kenaikan komoditas tidak terjadi berulang dan konsisten. Dengan demikian harga tinggi tidak lagi terjadi pada 2023.

Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Mantet menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan intensifikasi pajak yang menjadi kontributor utama pendapatan negara.

Salah satunya dengan memanfaatkan data yang diperoleh pemerintah dalam PTS pada tahun ini sehingga prospek penerimaan pada tahun depan bisa lebih tinggi dari target.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak sebagai penyeter utama kantong negara per April 2022 mencapai Rp567,69 triliun, tumbuh sebesar 51,49% secara tahunan dan setara dengan 44,88% dari target APBN 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan catatan ini merupakan gambaran pemulhan ekonomi nasional telah berjalan sesuai dengan skenario pemerintah.

Dia optimistis tren penerimaan negara pada masa mendatang mampu membaik. ■

Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi APBN Perubahan, yakni mencapai Rp3.106,4 triliun.

"Intervensi pemerintah melalui APBN memang sudah seharusnya dikurangi karena kita mengutamakan *countercyclical fiscal policy*," ujarnya. Ekonom Center of Reform on

Hlm: 11 - Kolom: Makro Ekonomi

Ketidakpastian Ekonomi Mengintai

Tingginya ketidakpastian ekonomi serta belum maksimalnya reformasi perpajakan memaksa pemerintah untuk tidak mengubah target penerimaan negara pada tahun depan.



Tantangan Penerimaan 2023

- Ketidakpastian harga komoditas utama dunia
- Perubahan struktur perekonomian dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi elektronik
- Masih relatif rendahnya basis pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak
- Fluktuasi harga masih menjadi tantangan utama pengelolaan PNBP SDA mineral pada 2023



Perbandingan Target Penerimaan Negara (Rp Triliun)

Keterangan	2022	2023
PENDAPATAN NEGARA	2.266,2	2.266,7-2.398,8
Penerimaan Perpajakan	1.784,0	1.884,6-1.967,4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	481,6	380,1-427,3

Perkembangan Penerimaan Perpajakan (Rp Triliun)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak	1.151,03	1.313,32	1.332,67	1.072,11	1.278,67
Bea dan Cukai	192,50	205,47	213,48	213,03	269,21
Pertumbuhan	4,56%	13,04%	1,80%	-16,88%	20,45%

Realisasi PNBP (Rp Triliun)





Selasa, 24 Mei 2022

Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi

Perpres terkait penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2022 rampung awal Juni.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

HANYA terpaut empat hari, Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali mewanti-wanti publik soal situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

Jumat (20/5) di depan webinar LPEI bertajuk Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan, Menkeu membeberkan tantangan plus risiko geopolitik, ekonomi, dan finansial global yang tidak kalah kompleksnya dari pandemi covid-19.

Kemarin, dalam konferensi pers APBN KITA, Sri Mulyani bahkan menyebutkan lebih spesifik bahwa inflasi tinggi, naiknya suku bunga, dan potensi melemahnya perekonomian tengah membayang-bayangi semua negara. Tidak terkecuali Indonesia. "Ketiganya memenga-

ruhi environment ekonomi seluruh dunia termasuk Indonesia. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan," kata Menkeu.

Sejumlah komoditas yang melonjak harganya itu, yakni gas alam 125,8%, batu bara 166,1%, minyak mentah brent 45,7%, CPO 20,9%, gandum 55,6%, jagung 31,6%, kedelai 28,1%, dan grain 15,5%.

"Penaikan harga komoditas akhirnya memicu inflasi tinggi. Indonesia masih terkendali karena tidak semua kenaikan harga komoditas dunia dirasakan masyarakat. Fokus kita tahun ini adalah menjaga pemulihan ekonomi, menjaga daya beli, dan kesehatan APBN," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani lalu membeberkan kinerja APBN 2022 dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dari sisi pendapatan, realisasi pada April

Penerimaan Negara sampai Akhir April 2022

• Penerimaan pajak nasional Rp567,69 triliun	• Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp108,4 triliun	• Penerimaan PNB Rp177,4 triliun
--	---	--

Kondisi APBN Kita sampai Akhir April 2022

- Belanja negara: Rp750,5 triliun (27,7% dari APBN).
- Pembiayaan investasi: Rp17 triliun.
- Realisasi belanja barang: Rp77,0 triliun.
- Realisasi belanja modal: Rp33,4 triliun.
- Realisasi anggaran perlindungan sosial: Rp129,0 triliun.
- Realisasi belanja subsidi: Rp56,6 triliun.
- Realisasi transfer ke pemerintah daerah: Rp242,43 triliun.
- Realisasi perpajakan daerah: Rp51,86 triliun.
- Realisasi belanja APBD: Rp175,86 triliun.
- Realisasi PCPEN: Rp80,79 triliun (17,73% dari anggaran).

Keterangan: APBN Kita: Kinerja dan fakta



Sumber: KemerkeuaLibang MI

tumbuh 45,9% dari periode sama tahun lalu atau sebesar Rp584,9 triliun. Setoran pajak sebesar Rp567,7 triliun (tumbuh 51,5%) dan bea cukai yang tumbuh 37,7% dari Rp78,7 triliun menjadi Rp108,4 triliun merupakan penyumbang terbesar APBN tahun berjalan (lihat grafik).

Kinerja belanja negara juga tercatat membaik. Belanja pemerintah pusat misalnya tumbuh 3,7% dari Rp489,8 triliun di April 2021 men-

jadi Rp508 triliun pada April 2022. Sedangkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tumbuh 4% dari Rp233,2 triliun menjadi Rp242,2 triliun di April.

"Akselerasi itu mengindikasikan pemulihan ekonomi di Indonesia berlanjut. APBN akan menjaga momentum itu," ungkap Sri Mulyani.

Perpres

Pada sisi lain, Dirjen Anggaran

Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan alas hukum berupa Perpres terkait penambahan subsidi dan kompensasi dalam APBN 2022 rampung awal Juni. "Banggar DPR sudah menyetujui."

Dalam rapat bersama Banggar DPR Kamis (19/5), pemerintah meminta tambahan belanja Rp392,2 triliun dari Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun.

Kenaikan belanja tersebut digunakan untuk menambal tambahan subsidi BBM, elpiji, dan listrik yang diperkirakan Rp74,9 triliun. Lalu, ada pula tambahan kompensasi BBM Rp234 triliun dan kompensasi listrik Rp41 triliun.

Dalam penilaian ekonom Bank Permata Josua Pardede peningkatan belanja sekitar Rp300 triliun itu sediaan diikuti lonjakan pendapatan sebesar Rp420 triliun. Apabila demikian adanya, tambahan subsidi justru akan menekan defisit APBN. "Potensi kenaikan harga BBM dan elpiji mengecil sehingga risiko kenaikan inflasi hingga akhir tahun juga berkurang." (Ant/X-3)

Selasa, 24 Mei 2022

Mewaspadaai Tekanan Stagflasi Global

Ryan Kiryanto

Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan

DALAM opininya di *Project Syndicate*, Nouriel Roubini, profesor emeritus ekonomi di Stern School of Business New York University, memberikan paparan menarik bahwa dunia bakal menghadapi badai stagflasi berkelanjutan (*Guardian*, 25/4/2022).

Pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menambah masalah, menyebabkan inflasi lebih tinggi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, negara-negara di dunia harus memperhitungkan risiko konflik militer skala besar, yang mendisrupsi aktivitas perdagangan dan produksi global. Selain itu, sanksi yang digunakan untuk mencegah dan menghukum agresi Rusia itu pun menjadi penyebab stagflasi.

Kawasan Eropa secara keseluruhan sangat rentan terhadap gangguan pada pasokan energi mereka, dengan 40% gas Uni Eropa berasal dari Rusia. Banyak ahli ekonomi mengingatkan bahwa hambatan akses Uni Eropa terhadap gas Rusia akan memicu salah satu resesi terdalam dalam beberapa dekade terakhir di Jerman dan zona euro.

Lonjakan harga gas di Eropa ibarat pil pahit bagi kawasan ini. Jika terjadi perang berkepanjangan, atau sanksi tambahan terhadap Rusia, harga bisa lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. Tanpa penghentian gas, pertumbuhan ekonomi di zona euro telah melambat menjadi hanya 0,2% pada kuartal pertama 2022, sementara inflasi naik ke rekor tertinggi 7,5%. Semua itu berujung pada pelemahan perekonomian dunia.

Konsensus global sekarang untuk pertum-

buhan ekonomi dunia rata-rata hanya 3,3% tahun ini, turun dari 4,1% diharapkan pada Januari lalu, sebelum perang meletus. Inflasi global diperkirakan sebesar 6,2%, atau 2,25% lebih tinggi daripada perkiraan Januari lalu. Demikian pula, IMF menurunkan perkiraan mereka untuk 143 negara tahun ini yang menyumbang 86% dari produk domestik bruto (PDB) global.

Realitas baru yang harus diperhitungkan banyak negara maju dan negara berkembang ialah inflasi lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kini dunia dihadapkan pada stagflasi yang sudah di depan mata. Laju inflasi melampaui ekspektasi, sementara perkiraan pertumbuhan dengan cepat menurun.

Karena itu, upaya luar biasa untuk dapat memerangi stagflasi saat ini ialah bagaimana menyiapkan serangkaian langkah kebijakan yang taktis, tepat waktu, tepat takaran, dan tepat sasaran untuk dapat mengatasi guncangan pasokan agregat yang negatif karena keterbatasan produksi yang justru berdampak pada kenaikan biaya.

Tidak berlebihan jika kondisi stagflasi akan terus menjadi 'ciri baru' ekonomi global, dengan disrupsi pasokan global telah mendorong inflasi lebih tinggi, memperlambat pertumbuhan, dan berpotensi menciptakan resesi di beberapa negara.

Roubini juga menekankan perang dingin baru antara AS dan Tiongkok juga akan menghasilkan efek stagflasi. Perubahan iklim pun akan mengakselerasi stagflasi. Kekeringan telah merusak tanaman, merusak panen, dan menaikkan harga pangan. Sama seperti badai, banjir, dan kenaikan permukaan air laut menghambat kegiatan ekonomi.

Dalam kondisi seperti ini, lonjakan harga energi yang tajam tidak dapat dihindari dan ketika harga energi naik, *greenflation* akan

memukul harga untuk bahan baku yang digunakan dalam panel surya, baterai, kendaraan listrik, dan teknologi bersih (ramah lingkungan) lainnya.

Perlu kebijakan taktis

Sejumlah negara melalui bank sentral mereka sudah berusaha keras menjinakkan inflasi melalui jalur suku bunga. Sebut saja AS, Korea Selatan, Selandia Baru, Inggris, dan Australia. Dengan inflasi tahunan mencapai 8,3%, tak ada pilihan bagi The Fed kecuali mengeremnya dengan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% dalam dua kali pertemuan terakhir mereka. The Fed juga menghentikan kebijakan *quantitative easing* seiring dengan pertumbuhan ekonomi tahunan yang melampaui ekspektasi.

Secara umum, seiring dengan pulihnya perekonomian di berbagai negara, langkah bank sentral menaikkan suku bunga menjadi salah satu terapi tepat meskipun masih ada kebijakan non-suku bunga yang juga bisa ditempuh. Kombinasi bauran kebijakan suku bunga dan nonsuku bunga (baca: kebijakan makroprudensial) bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tadi.

Kenaikan suku bunga bank sentral di berbagai negara sebagai barometer suku bunga komersial lazimnya akan diikuti perbankan. Hal itu memberikan sedikit tekanan ke pasar modal karena sebagian investor melakukan *switching* investasi dari portofolio pasar modal ke produk perbankan. Itu merupakan fenomena wajar sehingga tidak perlu dirispons dengan kebijakan



yang *over-reactive* atau *over-doses* yang justru bisa *over-killed*.

Ketepatan dosis besaran kenaikan suku bunga acuan menjadi penting untuk dipertimbangkan guna menciptakan ketenangan di pasar dan masyarakat luas. Sinyal awal terkait dengan kenaikan suku bunga acuan pun penting di-*create* sehingga ketika kenaikan suku bunga direalisasikan, pelaku pasar, dunia usaha, dan masyarakat luas bisa menerima dengan baik. Pasar keuangan tetap tenang. Dunia usaha dan masyarakat tetap beraktivitas normal.

Yang perlu dicermati

Terdapat dua hal, yang perlu

dicermati para pengambil kebijakan ketika terjadi lonjakan inflasi, disusul kenaikan suku bunga acuan. Pertama, lonjakan inflasi akan memengaruhi secara negatif para pekerja, terutama yang berpenghasilan tetap, lebih-lebih pekerja kerah biru. Maklum, dengan pendapatan relatif tetap, sementara lonjakan harga barang tak tertahankan, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap bisa terdiskon.

Kedua, sekiranya suku bunga perbankan/pembiayaan mengikuti gerakan suku bunga acuan yang naik, kebijakan tersebut seyogianya dikomunikasikan dengan baik (sebagai bagian implementasi prinsip *market conductor*) sehingga debitur bisa melakukan penyesuaian arus kasnya. Bank dan lembaga pembiayaan terhindar dari pinjaman bermasalah. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangan dapat dijaga sekaligus stabilitas moneter juga dapat dipertahankan.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.



Hlm: 6 - Kolom: Opini



Selasa, 24 Mei 2022

Celah Pembiayaan SDGs Melebar

Pembiayaan campuran yang menggabungkan pendanaan dari pemerintah dan swasta perlu dilakukan guna menutup celah pembiayaan SDGs.

HERYADI

heryadi@mediaindonesia.com

STAF Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan celah pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) di Indonesia membengkak, diperkirakan mencapai US\$1 triliun.

"Sebelum covid-19, celah pembiayaan tahunan global untuk SDGs telah mencapai

US\$2,5 triliun. Tapi angkanya melebar menjadi US\$4,2 triliun karena pandemi," kata Vivi dalam webinar *side event* G-20, kemarin.

Untuk menutup celah tersebut, negara-negara di dunia selama ini membuat pembiayaan campuran yang menggabungkan investasi dari pemerintah dan swasta dalam sejumlah program SDGs. Dengan pelebaran celah pembiayaan itu pula, sejumlah penyesuaian untuk pembiayaan campuran perlu dilakukan.

"Beberapa penyesuaian diketahui sebagai Pembiayaan Campuran 2.0 perlu dipertimbangkan untuk menarik

pembiayaan komersial, membangun kerangka umum untuk pembiayaan campuran, dan aksi efektif untuk pembiayaan campuran," katanya.

Berdasarkan *Convergence Report 2021*, negara-negara di Asia telah muncul sebagai tujuan modal campuran yang semakin penting. Pada 2020, Asia menyumbang sekitar 36% dari transaksi yang terkait dengan pembiayaan campuran, terutama dilakukan di Vietnam, Myanmar, dan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi untuk membangun pembiayaan yang berkelanjutan dengan SDGs sebagai kerangka utama.

"Kami telah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dengan menghasilkan *road map* keuangan berkelanjutan, taksonomi hijau, pemetaan investor SDGs, Indonesia Impact

Fund, dan pengarusutamaan SDGs dalam investasi perusahaan dan kebijakan pemerintah," katanya.

SDGs Indonesia One

Di webinar yang sama, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Faaris Pranawa mengatakan pihaknya telah memperoleh pembiayaan campuran sebesar US\$3,2 miliar untuk platform SDGs Indonesia One dari 35 mitra.

"Pada Maret 2022, kita memiliki dukungan besar sejumlah US\$3,2 miliar dari 35 mitra," katanya.

Ia mengatakan lembaga keuangan pembangunan seperti SMI memiliki peran penting sebagai perantara lokal untuk mengatur risiko dari pembiayaan program-program pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, pada 2018, SMI membangun Indonesia SDGs One sebagai platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indonesia tercatat membutuhkan pembiayaan untuk program pembangunan berkelanjutan hingga Rp18.911 triliun sepanjang 2020 sampai 2024 dan membutuhkan Rp6.445 triliun untuk menutup celah pembiayaan pembangunan infrastruktur.

"Karena itu, dengan produk dan jasa kami, kami dapat menghubungkan fokus pembiayaan sehingga kami tidak hanya membiayai pembangunan infrastruktur sebagaimana mandat utama kami, tapi juga membantu pencapaian SDGs," katanya. (Ant/E-2)

Hlm: 10 - Kolom: Ekonomi